



LAPORAN KINERJA 2025

TRIWULAN 4

**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) triwulan IV Tahun 2025 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPSDI sebagai unit kerja eselon III.b di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selama periode triwulan IV tahun 2025, BRPSDI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai target dan capaian kinerja, serta keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja BRPSDI selama triwulan IV tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal sekaligus umpan balik yang berguna dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan BRPSDI selama Tahun 2025.

Purwakarta, 9 Januari 2026
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Jr. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
I. PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan	9
1.3 Tugas dan Fungsi	9
1.4 Struktur Organisasi.....	10
1.5 Keragaan Pegawai	11
1.6 Sistematika Laporan Kinerja.....	13
1.7 Potensi dan Permasalahan.....	14
II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI	21
2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2025	22
2.4 Pengukuran Kinerja	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2025	24
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	51
IV. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut	52
4.3 Saran.....	52
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI tahun 2025 pada aplikasi KINERJAKU	5
Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020	11
Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan ASN dan non ASN Tahun 2025..	12
Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2025	13
Gambar 5. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2025 per tanggal 14 Januari 2026 Sumber: (http://kinerjaku.kkp.go.id).	24
Gambar 6. <i>Screenshot</i> capaian nilai IKPA BRPSDI pada aplikasi OMSPAN	29
Gambar 7. <i>Screenshot</i> capaian NKPA BRPSDI pada aplikasi SMART DJA.....	34
Gambar 8. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Desember 2025	43
Gambar 9. <i>Screenshot</i> perjanjian kerjasama dengan FPIK-UNTAG Cirebon dan FST-UT	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama triwulan IV Tahun 2025	6
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025	12
Tabel 3. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2025	15
Tabel 4. Tabel Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2025	22
Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI triwulan IV Tahun 2025	25
Tabel 7. Capaian IKK 1. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025.	26
Tabel 8. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	27
Tabel 9. Capaian IKK 2. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025.	28
Tabel 10. Perbandingan capaian nilai IKPA pada beberapa unit kerja yang diinformasikan pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN	29
Tabel 11. Capaian IKPA Satker lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	30
Tabel 12. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	31
Tabel 13. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	32
Tabel 14. Capaian IKK 4. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	33
Tabel 15. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	35
Tabel 16. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	36
Tabel 17. Posisi nilai IP-ASN BRPSDI dibandingkan Nilai IP-ASN Eselon 3 lingkup KKP (sumber: http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/962?page=1)	37
Tabel 18. Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	37
Tabel 19. Capaian IKK 6 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	38
Tabel 20. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP tahun 2025	39
Tabel 21. Capaian IKK 7 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	40
Tabel 22. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) tahun 2025	41
Tabel 23. Capaian IKK 8 Triwulan IV Tahun 2025	42
Tabel 24. Capaian Nilai PNBK lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	43
Tabel 25. Capaian IKK 9 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	45
Tabel 26. Capaian IK Kemitraan pada satker setara.	46
Tabel 27. Capaian IKU 10. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	47
Tabel 28. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Tahun 2025	48
Tabel 29. Capaian Dukungan Manajemen lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	48
Tabel 30. Capaian IKK 11 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025	49
Tabel 31. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai) tahun 2025 pada lingkup KKP	50
Tabel 32. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja tahun 2025	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Jatiluhur triwulan IV Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRPSDI Jatiluhur triwulan IV Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada awal tahun 2025, BRPSDI Jatiluhur telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja BRPSDI Jatiluhur Tahun 2025" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan dan sebelas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja BRPSDI Jatiluhur triwulan IV Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI tahun 2025 pada aplikasi KINERJAKU

Hasil pengukuran Indikator Kinerja BRPSDI pada triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **112,76%**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKK.

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari sebelas IKK yang telah disetujui, sebanyak 11 (Sebelas) IKK dapat diukur selama periode triwulan IV tahun 2025. Hasil validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keempat IKK tersebut telah mencapai target periodik yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 85, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85 (100,00%);
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 92, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 98,13 (106,66,00%);
3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 83,50 (104,38%);

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 71,5, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target tahunan yakni 82,5, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 93,91 (113,83%);
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
8. Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target tahunan yakni Rp. 2.200.000, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 33.815.448 (120,00%);
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan), memiliki target tahunan yakni 1, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 2 (120,00%);
10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100,00%);
11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 90, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (111,11%).

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama triwulan IV Tahun 2025

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW IV 2025		%
				TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai)	92	98,13	106,66
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80	83,50	104,38
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5	100,00	120,00
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5	93,91	113,83

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW IV 2025		%
		TARGET	REALISASI	
	6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00
	7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80	100,00	120,00
	8 Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.000	33.815.448	120,00
	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1	2	120,00
	10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	11 Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90	100,00	111,11

Secara Umum, Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada triwulan IV Tahun 2025 dapat dikategorikan **Istimewa** dengan skor **112,76**. Capaian kinerja BRPSDI dari 11 Indikator kinerja yang diukur, sebanyak 9 indikator kinerja berhasil mencapai prosentase capaian melebihi 100%, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya berhasil memperoleh nilai capaian 100%. Penjabaran detail mengenai capaian IKU akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja. Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 99,37% dari pagu anggaran Rp. 5,260,575,000. Perubahan BRPSDI tahun 2025 dari pagu semula Rp. 6.361.977.000,- dikarenakan adanya kebijakan relaksasi pasca efisiensi anggaran dimana blokir anggaran maka pagu efektif yang dapat digunakan adalah Rp. Rp. 5.260.575.000.

Selama pelaksanaan kegiatan periode triwulan IV tahun 2025, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain adanya dinamika kebijakan penganggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPSDM KP sehingga berdampak pada perubahan perencanaan dan rencana aksi yang dilakukan di BRPSDI. Kondisi ini ditindaklanjuti BRPSDI dengan optimalisasi dan rekomposisi anggaran dalam mendukung target kinerja sehingga secara umum capaian kinerja melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja BRPSDI pada tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan arahan guna meningkatkan kinerja BRPSDI pada masa mendatang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRPSDI berada pada lingkup unit organisasi binaan dibawah Sekretariat BPPSDMKP sebagai Unit Organisasi Pembina. BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020 yakni melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Laporan Kinerja BRPSDI Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7) Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 8) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029;
- 9) Perjanjian Kinerja BRPSDI Tahun 2025.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI dalam rangka mewujudkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di BRPSDI. Oleh karena itu, BRPSDI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudin dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) selama triwulan IV Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LKj BRPSDI disampaikan kepada Kepala BPPSDMKP melalui Sekretaris BPPSDMKP.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai saat ini KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. BRPSDI mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.80/MEN/2020 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;

- 2) Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, mencakup *restocking* sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
- 4) Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan Tim Kerja selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 meliputi Koordinasi dan pelaksanaan Fungsi Dukungan Manajerial, Keuangan, BMN, Kepegawaian, Perencanaan, Monev, Pelaporan, Pelayanan, Persuratan dan Rumah Tangga.

Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

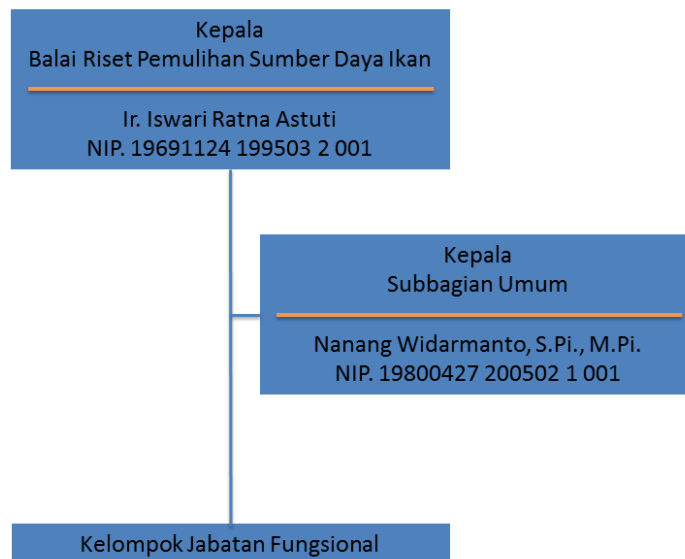
- 1) Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- 2) Pemulihan sumber daya ikan,
- 3) Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- 4) Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.

1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja BRPSDI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional instruktur, perencana, analis pranata keuangan, dan pustakawan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020

Berdasarkan Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor B.633/BRPSDI/KP.440/XII/2025, Kepala BRPSDI dibantu oleh 1 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah anggota sebanyak 31 orang ASN untuk mewujudkan 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian fungsi sebagai berikut :

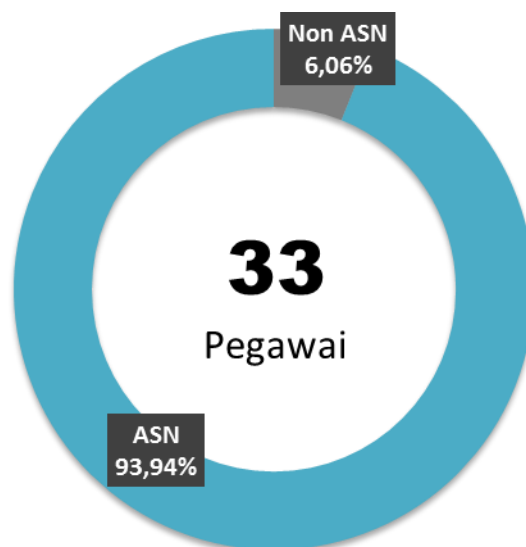
- Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial tersusun rapih
- Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan
- Kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
- Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
- Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.5 Keragaan Pegawai

Kondisi sumber daya manusia di BRPSDI Tahun 2025 adalah pegawai BRPSDI berjumlah 33 orang terdiri dari 24 Pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan 2 pegawai non-ASN (PJLP) dengan rasio 93,94% dan 6,06% (**Gambar 2**). Jumlah SDM yang terdapat di BRPSDI masih relatif ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kondisi sumber daya manusia BRPSDI Tahun 2025 disajikan pada **Tabel 2**.

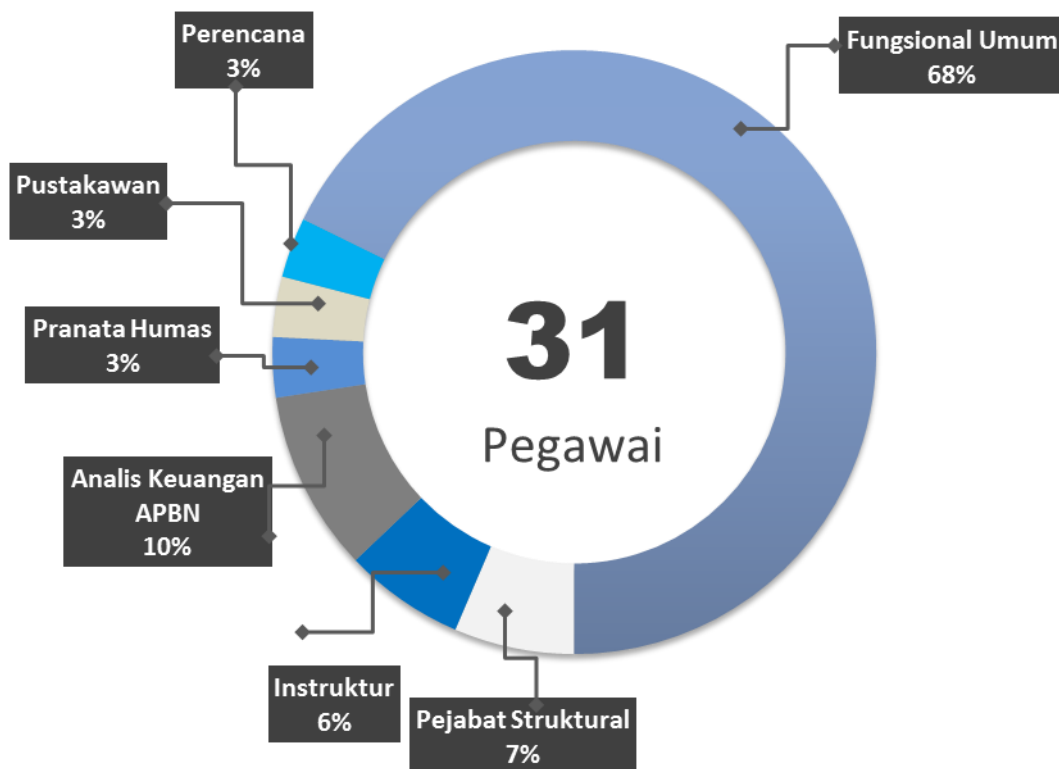
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025

No	Staf BRPSDI	ASN	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Perencana	1	-	1
7	Fungsional Umum	21	-	21
8	Tugas Belajar	-	-	0
9	Pramubakti	-	2	2
Jumlah		31	2	33



Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan ASN dan non ASN Tahun 2025.

Peta sebaran ASN fungsional dan non fungsional BRPSDI terdiri dari Instruktur (2 orang), Analisis Keuangan APBN (3 orang), fungsional Pustakawan (1 orang), Pranata Humas (1 orang), Perencana (1 Orang), fungsional umum (21 orang) dan pejabat struktural (2 orang). Persentase pegawai non fungsional (fungsional lainnya) tersebut merupakan staf pelaksana di BRPSDI dan beberapa fungsional non kelas (**Gambar 3**).



Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2025

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- 1. Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
- 2. Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM.
- 3. Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.7 Potensi dan Permasalahan

1.7.1 Potensi

A. Organisasi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

B. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan.

SDM pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) (pegawai negeri sipil/PNS dan PPPK) dan non ASN /tenaga kontrak. Pada tahun 2025, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan memiliki SDM BRPSDI mempunyai pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 31 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak sebanyak 2 orang (**Tabel 2**).

Tabel 3. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2025

No	Staf BRPSDI	ASN	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Perencana	1	-	1
7	Fungsional Umum	21	-	21
8	Tugas Belajar	-	-	0
9	Pramubakti	-	2	2
Jumlah		31	2	33

b. Sumber daya sarana-prasarana

Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi aset berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP. Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025, diantaranya

- Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentos dan Laboratorium Genetik.
- Gedung Kantor seluas: 1.058 m² dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17 September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
- Luas Tanah 3.988 m² yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang dipergunakan untuk rumah dinas;
- Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

1.7.2 Permasalahan

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap lebih dan kerusakan atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktifitas antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung salah satu misi KKP yaitu "Keberlanjutan" karena sumber daya ikan

yang pulih artinya dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat diperbarui.

Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:

1. Perubahan kelembagaan pasca transformasi lembaga riset berdampak penurunan pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan perubahan target kinerja pada tahun 2025.
2. Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber PNBK BRPSDI.
3. Terbatasnya informasi dan anggaran dalam pelibatan dan keikutsertaan pegawai pada pelatihan dan seminar menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari kegiatan perikanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya sehingga memerlukan pemulihan.

Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi riset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut di tingkat nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga semua peneliti yang sebelumnya bekerja di BPPSDM akan diintegrasikan ke dalam BRIN. Hal ini mengakibatkan transformasi kelembagaan, tugas, dan fungsi BPPSDMKP. Seluruh peneliti di BPPSDMKP harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan memindahkan diri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berdampak pada transformasi kelembagaan Pusat dan UPT yang terkait dengan BPPSDMKP. Penyesuaian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Meskipun demikian, hingga Triwulan IV, KKP masih

dalam proses menyusun Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut. Sehingga, susunan organisasi dan tata kerja BPPSDM untuk level Unit Pelaksana Teknis masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

2.1.1. Visi

Visi KKP 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi BRPSDI adalah mendukung Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 yang juga mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2. Misi

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan serta mengacu pada BPPSDMKP yang melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dukungan pada pencapaian tujuan BPPSDMKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan
2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, secara umum fungsi BRPSDI meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik di perairan tawar maupun laut. Berdasarkan mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BRPSDI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang dalam kertas kerja RKA-K/L.

2.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten". Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-2 Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat

SP-3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-4 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BPPSDMKP yang pada unit eselon III disebut sebagai Sasaran Kegiatan (SK) BRPSDI adalah:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Perubahan Sasaran Kegiatan (SK) dari *“Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”* pada tahun 2025 menjadi *“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”* pada tahun 2025, diikuti dengan beberapa perubahan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai pada tahun 2025. Adapun IKK yang dicascadingkan dari Sekretariat BPPSDMKP kepada BRPSDI Jatiluhur, antara lain:

1. Penambahan IKK baru yakni *“Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)”*; *“Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)”*; dan *“Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)”*.
2. Penghapusan IKK *“Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)”*; *“Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)”*; dan *“Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)”*.

Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”**. Indikator Kinerja yang mendukung SK ini antara lain:

1. IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 85;
2. IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai), memiliki target Tahunan 92;
3. IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 80,00;

4. IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 71,5;
5. IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target Tahunan 82,5;
6. IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 80;
7. IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 80;
8. IKK Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target Tahunan 2.200.000;
9. IKK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan), memiliki target Tahunan 1;
10. IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 100;
11. IKK Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 90;

2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan, BRPSDI, maka Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU DIPA AWAL (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF DIPA AWAL (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI I (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI II (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI VII (Rp. 000)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.361.977	6.304.981	5.047.399	5.420.575	5.260.575
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025		6.361.977	6.304.981	5.047.399	5.420.575	5.260.575
Tanggal Pengesahan		2 Desember 2024	2 Desember 2024	21 Februari 2025	9 April 2025	19 November 2025

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 6720-3055-4685-5943) yang setelah disahkan pada tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 6.361.977.000,-**. Sampai dengan periode triwulan IV Tahun 2025, BRPSDI telah melakukan 8 (delapan) kali revisi DIPA dengan pagu terakhir adalah **Rp 5.260.575**. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan relaksasi pembukaan blokir efisiensi.

2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2025

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah disusun suatu Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahunan BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja BPPSDMKP secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80
		8	Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.00
		9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
		10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100
		11	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis

polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BRPSDI dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada penyusunan Laporan Kinerja BRPSDI yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor: B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025 tentang pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dan TIM Penyusun Laporan kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Balai selaku Penanggung Jawab, Sub Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua, Sekretaris, Anggota dan Kontributor. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau langsung oleh Kepala Balai selaku Penanggung Jawab dan Sub Koordinator Tata Operasional sebagai penanggungjawab Tim Pengelolaan Kinerja, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada kepada Sekretaris BPPSDMKP.

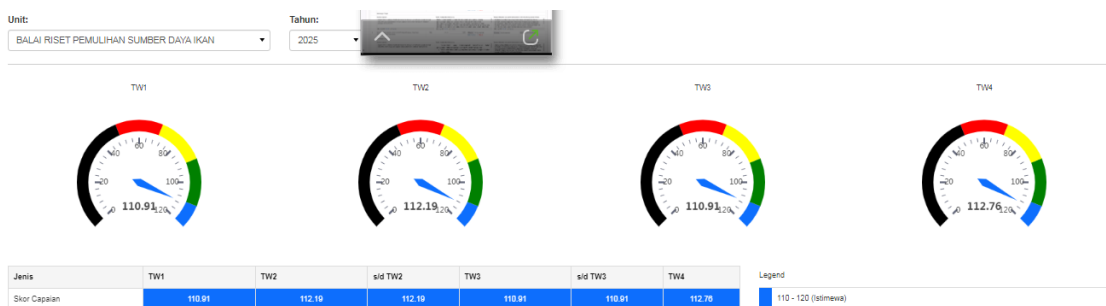
III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada Perjanjian kinerja BRPSDI tahun 2025 dapat tercapai.



Evaluasi dan analisis kinerja yang dibahas dalam LKj BRPSDI triwulan IV Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dokumen PK BRPSDI Tahun 2025. Pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK BRPSDI telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NKO. Nilai NKO ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Tahun 2025 berdasarkan dokumen PK Tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai 112,76%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKU.



Gambar 5. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2025 per tanggal 14 Januari 2026 Sumber: (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari sebelas indikator yang ditetapkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh IKK tersebut telah mencapai target periodik sesuai dengan rencana aksi.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI triwulan IV Tahun 2025

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW IV 2025		%
		TARGET	REALISASI	
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	92	98,13	106,66
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80	83,50	104,38
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5	100,00	120,00
	5 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5	93,91	113,83
	6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00
	7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80	100,00	120,00
	8 Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.000	33.815.448	120,00
	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1	2	120,00
	10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	11 Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90	100,00	111,11

Secara Umum, NKO BRPSDI triwulan IV Tahun 2025 yang telah diukur dapat dikategorikan **Istimewa**. Nilai yang ditargetkan sudah terpenuhi, bahkan sebagian besar melebihi target. Penjabaran detail mengenai capaian IKK akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPSDI. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPSDI yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Pada sasaran kegiatan ini BRPSDI berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten” melalui Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP”. Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersebut dilakukan dengan menghasilkan 11 Indikator Kinerja. Adapun penjabaran IKK tersebut antara lain:

IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang terbit pada periode Tahun 2024 s.d. Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dikategorikan sebagai IKK yang memiliki tingkat validitas output kendali tinggi. Periode sasi pengukuran IKK ini dilakukan setiap triwulan.

Tabel 7. Capaian IKK 1. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025.

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	80	82 (100%)	85	85	100%	-	85	100%

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan IV tahun 2025 diambil dari Nota Dinas Sekretariat BPPSDMKP perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025 No. B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. Adapun nilai capaian IKK ini ialah sebagai berikut:

Nilai capaian IKK1 tahun triwulan IV 2025 ialah 85. Nilai tersebut merupakan representasi atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2024 s.d. Tahun 2025 telah ditindaklanjuti oleh tim secara tuntas. Capaian tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah tetap 100% hal ini dikarenakan BRPSDI tidak termasuk satker yang melaksanakan uji petik pengawasan Itjen. Dari nilai yang dicapai pada IKK ini terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 memperoleh nilai 80 dan 82 pada 2024.

Tabel 8. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	80	57	71,25
2	Pusat Pendidikan KP	26	24	92,31
3	Pusat Pelatihan	4	4	100,00
4	Pusat Penyuluhan (Pusriskel)	25	25	100
5	BBRP2BKP	0	0	0
6	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BDA SUKAMANDI	4	4	100,00
2	BPPP TEGAL	17	17	100,00
3	SUPM LADONG	2	2	100,00
4	SUPM KOTA AGUNG	2	2	100,00
5	SUPM TEGAL	49	49	100,00
6	SUPM WAIHERU	2	2	100,00
7	POLTEK AUP JAKARTA	56	52	92,86
8	POLTEK SORONG	1	1	100,00
9	POLTEK BITUNG	1	1	100,00
10	POLTEK BONE	23	23	100,00
11	POLTEK SIDOARJO	4	4	100,00
12	POLTEK KARAWANG	25	25	100,00
13	POLTEK KUPANG	1	1	100,00
14	POLTEK JEMBRANA	1	1	100,00
15	POLTEK DUMAI	1	1	100,00
16	POLTEK PANGANDARAN	13	13	100,00
17	AKADEMI KOMODITAS WAKATOBI	1	1	100,00
18	BRPPUPP PALEMBANG	11	11	100,00
19	BRPBAPP MAROS	5	5	100,00
20	BRPBATP BOGOR	3	3	100,00

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditopang oleh sejumlah **faktor pendukung**, terutama komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BRPSDI dalam mengelola siklus anggaran secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan dengan konsistensi yang berlandaskan prinsip kepatuhan, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, dan kewajaran. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas juga menjadi elemen krusial untuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan dapat diterapkan secara efektif serta mendukung peningkatan kinerja dan memperkecil peluang terjadinya temuan. Selain itu, pencapaian IKK ini turut diperkuat oleh **kegiatan pendukung** dalam capaian IKK ini diantaranya adalah adanya keterlibatan aktif pimpinan, khususnya Kepala BRPSDI, yang secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan memberikan arahan serta memastikan terlaksananya SPIP sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat secara efektif dijalankan dan meminimalisir temuan.

IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Tabel 9. Capaian IKK 2. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025.

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
95,35	97,02	95,37	99,98 (106,63)	92	98,13	106,66	-	92	106,66

IKK ini ditetapkan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini

dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.76				100.00				

Gambar 6. *Screenshot* capaian nilai IKPA BRPSDI pada aplikasi OMSPAN

Penilaian IKK ini menggunakan instrumen dari Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi OMSPAN (Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara) pada website (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKK tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026.

Pada periode triwulan IV tahun 2025, BRPSDI berhasil memperoleh capaian Nilai IKPA 98.13 dan berhasil melebihi target dengan prosentase capaian 106,66%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dimana nilai IKPA tahun 2021 mencapai 95,35 dan 97,02 pada 2022, 95,37 pada 2023 dan 99,98 pada 2024. Sementara itu, jika dilihat persentase ketercapaian terhadap target tahun sesuai renstra tercapai sebesar 106,63%.

Pada level kementerian, Capaian nilai IKPA BRPSDI menunjukkan nilai IKPA BRPSDI tertinggi ke-34 dibandingkan capaian nilai IKPA pada unit kerja lain pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas terkait.

Tabel 10. Perbandingan capaian nilai IKPA pada beberapa unit kerja yang diinformasikan pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN

No	Unit Kerja	Nilai IKPA
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	100
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	99,98
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	98,13
4	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	97.90
5	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa BARAT	77.36

Capaian nilai IKPA BRPSDI tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah **faktor pendukung**, diantaranya adalah penyerapan anggaran yang optimal,

pengelolaan UP dan TUP yang baik, serta penyelesaian tagihan. Dengan optimalnya penilaian pada paramater tersebut capaian nilai IKPA BRPSDI tahun 2025 berhasil melampaui target. Meskipun demikian, nilai pada deviasi halaman III DIPA masih belum optimal dikarenakan banyaknya revisi anggaran karena kebijakan yang dilakukan selama periode tahun 2025. Hal ini tentu menjadi catatan untuk evaluasi perbaikan kedepan. Selain itu, terdapat pula **kegiatan pendukung** yang mendorong tercapainya input IKPA, yaitu diantaranya adalah kegiatan pembaruan capaian RO yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan aspek kualitas pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara konsisten, dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan terhadap nilai IKPA melalui aplikasi OM-SPAN untuk memastikan perkembangan capaian IKPA setiap bulannya, serta ketepatan dalam pengelolaan UP dan TUP.

Tabel 11. Capaian IKPA Satker lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian
1	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	98,93
2	Balai Riset Pemuliaan Ikan	99,49
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	98,09
4	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	98,46
5	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	99,96
6	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	99,72
7	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100,00
8	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	98,13
9	Loka Riset Perikanan Tuna	92,20
10	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	99,83
11	Balai Riset Perikanan Laut	99,65

IKK 3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Tabel 12. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	81,2	82,25 (104,78)	80	83,5	104.37	1.51	80	104.37

Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP BRPSDI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

BRPSDI telah mengikuti kegiatan penilaian mandiri SAKIP yang diselenggarakan oleh BPPSDMKP dengan hasil penilaian mandiri SAKIP Level 3 lingkup BPPSDMKP ini disampaikan melalui surat No B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025.

Hasil penilaian mandiri SAKIP pada triwulan IV tahun 2025 BRPSDI berhasil memenuhi target nilai 80 dengan capaian 83,25 (104,37%). Capaian ini lebih dari penilaian tahun sebelumnya yaitu 82,25 pada tahun 2024 dengan peningkatan sebanyak 1,51% dan 81,2 pada tahun 2023. Sementara itu, jika dilihat persentase ketercapaian terhadap target tahun 2025 sesuai renstra tercapai sebesar 104,78%. Capaian nilai PM SAKIP BRPSDI pada lingkup unit kerja eselon 3 BPPSDM KP menunjukkan nilai IP-ASN BRPSDI relatif tinggi. Pada lingkup BPPSDMKP, Capaian nilai PM SAKIP BRPSDI termasuk dalam 7 besar jika dibandingkan capaian nilai pada satker lain.

Capaian kinerja BRPSDI terkait perolehan nilai Penilaian Mandiri SAKIP dipengaruhi oleh beberapa **Faktor Pendukung** diantaranya yaitu komitmen BRPSDI dalam memenuhi aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan

evaluasi kinerja selama 5 tahun terakhir, serta peningkatan nilai kinerja anggaran dan organisasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pencapaian nilai SAKIP dimasa mendatang menjadikan budaya kinerja yang baik dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja menjadi sangat penting. Capaian kinerja BRPSDI pada IKK 3 ini juga dipengaruhi adanya **Kegiatan Pendukung** berupa kegiatan yang pelaporan kegiatan secara berkala serta pengunggahan laporan tepat waktu dan kesesuaian informasi yang tersedia. Selain itu kegiatan pendampingan dalam penyusunan dan penilaian dokumen SAKIP serta tindak lanjut LKJ dan rekomendasi SAKIP juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan.

Tabel 13. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Satker	Capaian
1.	BPPP Medan	85,00
2	Politeknik KP Jember	84,70
3	BRPPUPP Palembang	84,40
4	BRBIH Depok	84,25
5	Politeknik AUP	83,95
6	Politeknik KP Sidoarjo	83,60
7	BPPP Ambon	83,50
8	BPPP Tegal	83,50
9	BRPBAPP Maros	83,50
10	BRPI Sukamandi	83,50
11	BRPSDI Jatiluhur	83,50
12	LRBRL Gorontalo	83,50
13	LRMPHP Bantul	83,50
14	LRPT Benoa	83,50
15	LRSDKP Bungus	83,50
16	BPPP Banyuwangi	83,15
17	BPPP Bitung	83,15
18	BRPL Ancol	83,15
19	BBRBLPP Gondol	83,05
20	BRPBATPP Bogor	82,90
21	Politeknik KP Pangandaran	82,75
22	BDA Sukamandi	82,65
23	AK Wakatobi	82,30
24	Politeknik KP Sorong	82,25
25	Politeknik KP Karawang	82,20
26	Politeknik KP Dumai	82,15
27	Politeknik KP Bitung	81,85
28	Politeknik KP Kupang	81,85
29	SUPM Waeheru	81,80
30	Politeknik KP Bone	81,35

No	Satker	Capaian
31	SUPM Ladang	81,35
32	SUPM Pariaman	81,35
33	SUPM Pontianak	81,35
34	SUPM Tegal	81,35
35	LPTK Wakatobi	81,20
36	SUPM Kota Agung	81,05
37	SUPM Sorong	80,60

IKK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 14. Capaian IKK 4. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)*									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
85,8	86,55	86,11	100 (120)	71,5	100	120	-	71,5	120

*Tahun 2021-2023 nama IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Tahun 2024 berubah formulasi menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Penilaian IKK ini dilakukan dengan menggunakan instrumen eksternal yakni aplikasi Monev Kemenkeu (<http://monev.kemenkeu.go.id/>). Hasil

penilaian IKK tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui Nota Dinas Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

Capaian nilai NKPA BRPSDI pada triwulan IV tahun 2025 berhasil memperoleh nilai 100. Nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 berhasil mencapai nilai 85,8, 86,55 pada tahun 2022, 86,11 pada tahun 2023 dan 100 pada tahun 2024. Sementara itu, jika dilihat persentase ketercapaian terhadap target tahun sesuai renstra tercapai sebesar 120%. Capaian nilai NKPA yang tinggi ini disebabkan oleh tercapainya nilai maksimum pada ketiga komponen penilaian NKPA yaitu CRO, penggunaan SBK, dan efisiensi SBK.



Gambar 7. *Screenshot* capaian NKPA BRPSDI pada aplikasi SMART DJA

Capaian IKK 4 pada triwulan IV tahun 2025 berhasil diperoleh dengan penggunaan anggaran secara efisien dengan nilai efisiensi 20,46% yang diperoleh dari perbandingan serapan anggaran 99,54% dan capaian kegiatan sebesar 120%. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI tahun 2025 diraih melalui sejumlah **faktor pendukung**, salah satunya adalah pemanfaatan anggaran yang disesuaikan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku. Penggunaan anggaran tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi output serta evaluasi nilai efisiensi secara berkala, sehingga pengelolaan anggaran tetap terarah dan akuntabel. Selain faktor tersebut, keberhasilan BRPSDI dalam memenuhi target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran turut diperkuat oleh beberapa kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi pengkinian data capaian RO secara konsisten pada aplikasi SAKTI untuk memastikan bahwa informasi kinerja selalu mutakhir dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Di samping itu, pemantauan berkelanjutan terhadap penyerapan anggaran yang diselaraskan dengan

rencana penarikan juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan dan realisasi, sehingga kontribusinya signifikan terhadap pencapaian kinerja perencanaan anggaran secara keseluruhan.

Tabel 15. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian
1	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	100
2	Balai Riset Perikanan Laut	100
3	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100
5	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	100
6	Loka Riset Perikanan Tuna	100
7	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100
8	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100
9	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100
10	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100

IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai capaian indeks profesionalitas ASN diperoleh dari jumlah nilai kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN. Nilai kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar pada pegawai. Nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai pada diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat teknis dan fungsional untuk fungsional umum dan pejabat fungsional, serta seminar untuk pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-

masing. Sedangkan nilai kedisiplinan ditentukan berdasar ada tidaknya hukuman disiplin yang dikenakan pada pegawai.

Tabel 16. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-1. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
84,64	82,4	91,6	93,14 (113,59)	82,5	93,91	113,83	0.24	82,5	113,83

Pengukuran IKK Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ropeg KKP (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/962?page=1>) dan disampaikan secara resmi melalui surat dinas Sekretariat BPPSDM KP No B. 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2025 tanggal 6 Januari 2025. Hasil penilaian IP-ASN BRPSDI pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian IP ASN pada triwulan IV tahun 2025 berhasil memenuhi target dimana dari target 82,5 berhasil dicapai 93,91. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 capaian nilai IP-ASN BRPSDI 84,63 dan meningkat pada tahun 2022 mencapai nilai 82,4. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 82,4, namun pada tahun 2023 BRPSDI mampu kembali meningkatkan nilai IP ASN menjadi 91,6 serta kembali ditingkatkan pada tahun 2024 senilai 93,14. Sementara itu, persentase ketercapaian terhadap target tahun sesuai renstra tercapai sebesar pada tahun 2025 113,59%.

Capaian nilai IP-ASN BRPSDI pada lingkup unit kerja eselon 3 KKP menunjukkan nilai IP-ASN BRPSDI relatif tinggi dibandingkan capaian nilai IP-ASN pada unit kerja lain. Pada lingkup BPPSDMKP maupun lingkup KKP, Capaian nilai IP-ASN BRPSDI tertinggi ke-3 dibandingkan capaian nilai IP-ASN pada unit kerja lain. Keberhasilan BRPSDI dalam mencapai target nilai IP-ASN disebabkan oleh peran aktif pegawai BRPSDI dalam memenuhi target 20 JP untuk diklat dan seminar.

Tabel 17. Posisi nilai IP-ASN BRPSDI dibandingkan Nilai IP-ASN Eselon 3 lingkup KKP (sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/962?page=1>)

No	Satker Lingkup BPPSDMKP	Nilai IP-ASN
1	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir,	95
2	Politeknik KP Dumai	94,08
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	93,91
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan	93,8
5	Biro Hukum	93,78
6	Pusat Kebijakan Strategis	93,54
7	Akademi Komunitas KP Wakatobi	93,24
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	93,12
9	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	92,78
10	Stasiun KIPM Bandung	92,41

Tabel 18. Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target IP ASN	Nilai IP ASN	Persentase Capaian (Nilai/Target) x 100%
1	BPPSDM (untuk Sekretariat BPPSDM)	81	85.61	105.69%
2	Pusat Penyuluhan KP	82	87.03	106.13%
3	Pusat Pendidikan KP	87	88.96	102.25%
4	Pusat Pelatihan KP	83	89.73	108.11%
5	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP	80	90	112.50%
6	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	76	93.8	123.42%
7	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP	85	88.49	104.11%
8	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83.39	102.95%
9	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	81	83.35	102.90%
10	Balai Riset Perikanan Laut	83	88.5	106.63%
11	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	82.5	93.91	113.83%
12	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	84.29	104.06%
13	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	84.99	104.93%
14	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	82	88.89	108.40%
15	Balai Riset Pemuliaan Ikan	83	87.4	105.30%

Capaian nilai IP ASN pada ini didukung oleh adanya Faktor pendukung berupa jenjang pendidikan pegawai BRPSDI dimana pegawai ASN dengan tingkat pendidikan S1 dan S2. Selain itu peran aktif pegawai dalam pemenuhan diklat 20 JP dan seminar serta skor predikat kinerja sangat baik berpengaruh signifikan pada pencapaian target nilai IP-ASN pada tahun 2025. Capaian IKK

IP ASN juga memiliki kegiatan pendukung dalam memperoleh target capaian nilai IP-ASN berupa ketersediaan fasilitas perkantoran yang mendukung pegawai dalam memfasilitasi keikutsertaan pelatihan dan seminar secara daring.

IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI didefinisikan sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan pada setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.

Tabel 19. Capaian IKK 6 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120%	-	80	120%

Pengukuran IKK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) diperoleh Nilai Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 100 atau 120% sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang "Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025”.

Pada triwulan IV tahun 2025 ini, BRPSDI berhasil memperoleh nilai capaian 100 dari target yang ditentukan sebesar 80. Prosentase capaian pada IKK ini sebesar 120%. Namun demikian, nilai ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKK ini adalah IKK baru yang dicascadingkan tahun 2025.

Tabel 20. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP tahun 2025

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Monor				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode PD / EC / DL)	Program 2 (Kode HS)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815.181.000	1.030.758.000	1.845.939.000	576.115.000		1.269.824.000	1.845.939.000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BERBLPP	2.534.284.000	-	2.534.284.000			2.534.284.000	2.534.284.000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6.063.515.000	-	6.063.515.000			6.063.515.000	6.063.515.000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BRSEKP	114.882.000	-	114.882.000			114.882.000	114.882.000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630.825.000	1.452.437.000	2.123.266.000			47.589.000	2.123.266.000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3.716.863.000	5.714.647.000	9.431.510.000	5.753.200.000		3.678.310.000	9.431.510.000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2.313.249.000	-	2.313.249.000	286.374.000		2.026.875.000	2.313.249.000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2.124.597.000	-	2.124.597.000	276.203.000		1.848.394.000	2.124.597.000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19.759.969.000	-	19.759.969.000	16.630.596.000		3.169.373.000	19.759.969.000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1.453.775.000	-	1.453.775.000			1.453.775.000	1.453.775.000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HASI BRBPI	2.579.025.000	-	2.579.025.000			2.579.025.000	2.579.025.000	0	100.00%
12	BALAI RISET PENYULUHAN IKAN BRPI	3.697.213.000	-	3.697.213.000			3.697.213.000	3.697.213.000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2.085.628.000	-	2.085.628.000			2.085.628.000	2.085.628.000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7.756.205.000	197.855.000	7.954.064.000	1.611.115.000		6.342.949.000	7.954.064.000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4.935.402.000	-	4.935.402.000			4.935.402.000	4.935.402.000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPI	904.514.000	-	904.514.000			904.514.000	904.514.000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5.671.292.000	543.937.000	6.215.229.000			6.215.229.000	6.215.229.000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219.049.000	1.237.094.000	1.456.143.000			1.456.143.000	1.456.143.000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRSBR	1.223.254.000	74.096.000	1.297.350.000			1.297.350.000	1.297.350.000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442.411.000	483.225.000	925.636.000			925.636.000	925.636.000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1.941.830.000	-	1.941.830.000			1.941.830.000	1.941.830.000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESIRIS LRSKP	1.035.054.000	1.053.546.000	2.088.600.000	5.777.684.000		2.088.600.000	2.088.600.000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15.571.107.000	-	15.571.107.000			15.571.107.000	15.571.107.000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2.209.869.000	-	2.209.869.000	1.086.967.000		1.122.872.000	2.209.869.000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1.536.411.000	3.197.761.000	4.736.172.000	1.451.020.000		3.285.152.000	4.736.172.000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2.539.286.000	2.380.852.000	4.920.138.000	3.316.198.000		1.612.140.000	4.920.138.000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBERANA	711.207.000	1.923.054.000	2.634.261.000	1.156.133.000		1.478.128.000	2.634.261.000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27.426.832.644	-	27.426.832.644	24.802.476.044		2.534.356.600	27.426.832.644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799.005.000	2.064.944.000	2.863.949.000	530.979.000		2.332.970.000	2.863.949.000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1.436.446.000	-	1.436.446.000	220.888.000		1.217.558.000	1.436.446.000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOAJU	9.709.402.000	-	9.709.402.000	6.378.082.000		3.331.310.000	9.709.402.000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SOBOENG	2.966.563.000	5.209.960.000	8.176.523.000	6.240.862.000		1.935.671.000	8.176.523.000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7.486.312.000	-	7.486.312.000	1.860.000		7.484.452.000	7.486.312.000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1.296.526.000	-	1.296.526.000	226.188.000		1.069.307.000	1.296.526.000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	910.955.000	1.088.140.000	1.999.095.000	755.610.000		1.243.485.000	1.999.095.000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2.989.553.000	16.902.000	3.006.455.000	902.105.000		2.104.350.000	3.006.455.000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851.173.000	-	851.173.000			851.173.000	851.173.000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1.049.987.000	-	1.049.987.000			1.049.987.000	1.049.987.000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1.580.550.000	-	1.580.550.000	436.305.000		1.144.245.000	1.580.550.000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WIAHERU	754.234.000	1.209.683.000	1.963.917.000	507.300.000		1.456.617.000	1.963.917.000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25.694.351.464	-	25.694.351.464	10.527.303.000		15.167.048.464	25.694.351.464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183.690.000	-	183.690.000	50.690.000		133.040.000	183.690.000	0	100.00%

Faktor pendukung dalam pencapaian IKK ini antara lain berasal dari proses identifikasi serta penginputan data terkait efisiensi maupun penambahan anggaran pada belanja pengadaan. Data tersebut kemudian disusun dan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja (format Excel) yang berfungsi sebagai data pendukung pada saat dilakukan klarifikasi terhadap usulan penyesuaian Pagu Pengadaan. Selanjutnya, dokumen tersebut diunggah ke dalam aplikasi SIRUP sebagai bagian dari tahapan klarifikasi dan proses perbaikan data.

Selain itu, terdapat pula **kegiatan pendukung** lain yang turut memperkuat pencapaian IKK 6, yaitu pelaksanaan revisi DIPA/RKA-KL yang berlanjut pada perbaikan di aplikasi SIRUP melalui penyesuaian atau revisi paket penyedia. Perbaikan ini tidak hanya membantu memperbarui dan menata ulang informasi dalam sistem, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas data, serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

IKK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BRPSDI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)

IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) terbagi menjadi 5 (lima) unsur, yakni:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

Tabel 21. Capaian IKK 7 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	-	80	120

Pengukuran IKK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) diperoleh Nilai Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 100 atau 120% sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat BPPSDMKP Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Capain IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025”.

Pada triwulan IV tahun 2025 ini, BRPSDI berhasil mencapai target yang ditentukan yaitu dari target 80 dengan capaian 100 (120%). Namun demikian, nilai ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKK ini adalah IKK baru yang dicascadingkan tahun 2025. Pada lingkup BPPSDMKP

merupakan salah satu dari 9 satker yang berhasil mencapai nilai maksimum yaitu 100. Realisasi Anggaran untuk mendukung capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) sebesar 100% dan capaian indikator kinerja sebesar 120,00% dengan efisiensi 20,00%.

Tabel 22. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) tahun 2025

NO	NAMA SATKER	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Balai Riset Pemuliaan Ikan	80	100
2	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	80	100
3	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	80	100
4	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang	80	100
5	Sekretariat BPPSDM KP	80	100
6	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	80	100
7	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waiheru Ambon	80	100
8	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	80	100
9	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	80	100
10	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	80	97,5
11	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	80	97,5
12	Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	80	97,5
13	Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5
14	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian IKK ini diantaranya adalah kepatuhan dalam memenuhi beberapa parameter yang dinilai, antara lain: a) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: (1) Laporan RKBMN Tahun 2025 dan Revisi (jika terdapat revisi); (2) RKAKL Tahun 2025 revisi terakhir. b) Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN TA. 2025 sampai dengan triwulan III Tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang. c) Dokumen usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN TA. 2025 untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan triwulan III Tahun 2025. d) Penggunaan BMN Hasil Pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima atau surat keputusan penggunaan BMN (BAST/Berita Acara Pemakaian). e) Laporan BMN Tahunan 2024 dan Semester 1 TA. 2025 beserta surat penyampaian kepada eselon 1. f) Surat Usulan RKBMN.

Terkait pencapaian IKU tersebut, **kegiatan pendukung** keberhasilan antara lain: a) Pemanfaatan RKBMN terhadap penyusunan RKAKL. b) Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dengan data dukung berupa Surat Keputusan. c) Pemindahtanganan/Penghapusan BMN dengan data dukung

berupa Surat Keputusan Penghapusan BMN. d) Tertib administrasi BMN dengan data dukung berupa Berita Acara Pemakaian BMN. e) Penyusunan laporan BMN dengan data dukung berupa Catatan Laporan BMN Semesteran dan Tahunan. f) Penyusunan RKBMN dengan data dukung berupa Dokumen RKBMN.

IKK 8. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)

IKK Nilai PNBP didefinisikan sebagai manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKK ini merupakan IKK baru yang dicascadingkan sampai level UPT. Besaran target yang ditetapkan yakni 2.200.000 Rupiah. IKK nilai PNBP termasuk dalam IKK yang memiliki komposisi validitas Output Kendali Rendah, sedangkan untuk periodisasi waktu pengukuran dari IKK ini ialah triwulanan. Data dukung/bukti capaian yang disepakati ialah data realisasi PNBP yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN dan Surat Penyampaian Capaian IKK PNBP dari Kepala BRPSDI kepada Sekretaris BPPSDMKP. Berikut merupakan capaian IKK nilai PNBP BRPSDI Tahun 2025:

Tabel 23. Capaian IKK 8 Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-8. Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	28.922.360	16.993.520 (120%)	2.200.000	33.815.448	2039.30 %	1537,1%	2.200.000	1537,1%

Berdasarkan data pada tabel diatas, target nilai PNBP pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.200.000,- dan berhasil dicapai dengan nilai capaian IKK Nilai PNBP BRPSDI Tahun 2025 yakni sebesar **Rp. 33.815.448,-** yang diperoleh s.d 31 Desember 2025.

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,864,000	0	0	3,485,448	0	13,349,448
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
3	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	18,896,000	0	0	0	0	18,896,000
4	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000
GRAND TOTAL		0	30,330,000	0	0	3,485,448	0	33,815,448

Gambar 8. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Desember 2025
(sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

Tabel 24. Capaian Nilai PNPB lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER LINGKUP BPPSDMKP TAHUN 2025				
NO	Kode Nama Satker	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.853.240.000	50.136.939.163	129,04%
	SATKER PNPB	14.250.179.000	11.126.256.821	78,08%
1	03212-237373 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	780.431.842	274,6%
2	03212-238010 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	411.665.000	472.324.776	114,7%
3	03212-238741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	55.052.000	57.172.492	103,9%
4	03212-238755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	735.185.000	778.364.570	105,9%
5	03212-238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	319.141.000	402.849.385	126,2%
6	03212-239260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	233.678.011	123,9%
7	03212-352595 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	17.177.000	23.161.771	134,8%
8	03212-403817 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	28.393.000	28.393.736	100,0%
9	03212-403820 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	13.459.398	-
10	03212-403821 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	159.143.859	289,2%
11	03212-403822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	58.519.975	-
12	03212-403823 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	39.982.000	41.312.999	103,3%
13	03212-403824 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	33.815.448	1537,1%
14	03212-403826 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	-	7.160.000	-
15	03212-403827 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	241.328.000	251.780.664	104,3%
16	03212-403828 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	941.493.000	1.028.132.377	109,2%

Target nilai PNPB pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 2.200.000,- dan berhasil dicapai dengan nilai capaian IKK Nilai PNPB BRPSDI 2 Tahun 2025 yakni sebesar Rp. 33.815.448,- yang diperoleh s.d 31 Desember 2025. Nilai capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan PNPB pada periode triwulan IV tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 yakni senilai Rp. 16.993.520,- dan 2023 senilai Rp. 28.922.360. Kenaikan capaian PNPB ini dikarenakan adanya peningkatan nilai dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Capaian nilai PNPB 2025 ini cukup tinggi dengan mencapai 1537,1% dari target yang ditetapkan.

Capaian nilai PNPB BRPSDI pada triwulan IV tahun 2025 jika dibandingkan dengan satker lain yang setara pada lingkup BPPSDMKP termasuk

pada satker yang berhasil memperoleh nilai capaian PNBP melebihi target tahunan yang ditentukan dengan capaian prosentase riil adalah 1537,1%. Capaian PNBP BRPSDI telah diumumkan dalam Nota dinas dari Sekretariat BPPSDMKP No. 178/BPPSDM.1/ KU.340/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Capaian Kinerja PNBP Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2025.

Faktor pendukung dalam peningkatan capaian PNBP sepanjang tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh keberlanjutan permintaan jasa sewa alat survei BRPSDI dari berbagai lembaga, serta kontribusi pendapatan yang diperoleh melalui penjualan peralatan mesin. Kedua sumber pendapatan ini menjadi pendorong utama yang memastikan peningkatan PNBP dapat berjalan stabil sepanjang tahun.

Beberapa **Kegiatan pendukung** yang ikut memperkuat pencapaian target PNBP diantaranya adalah Kegiatan magang mahasiswa/taruna dan kehumasan memberikan tambahan eksposur terhadap layanan BRPSDI sekaligus memperluas jaringan pemanfaat jasa yang berdampak pada peningkatan PNBP dari jasa analisa dan sewa sarpras. Peningkatan PNBP dari penjualan alat diperoleh melalui proses lelang yang berkoordinasi dengan KPKNL Purwakarta melalui mekanisme naik-naik untuk menaikkan capaian PNBP dari penjualan alat.

IKK 9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)

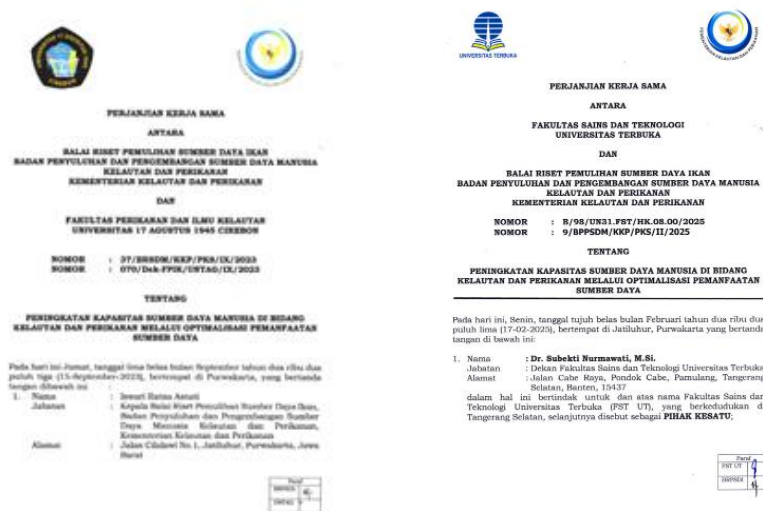
IKK ini didefinisikan sebagai Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPSDI mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian.

BRPSDI pada tahun 2025 berhasil menjalin kemitraan sebanyak 2 kesepakatan kemitraan yaitu kesepakatan kemitraan dengan FPIK-UNTAG Cirebon dan FST-Universitas Terbuka. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah kesepakatan yang dicapai pada tahun 2023 sebanyak 1 kesepakatan dan 2 kesepakatan pada tahun 2023.

Tabel 25. Capaian IKK 9 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-9. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	2	1 (100%)	1	2	120	20%	1	120

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja kemitraan BRPSDI tahun 2025 dalam hal ini kemitraan dengan perguruan tinggi meliputi (1) adanya keselarasan tujuan kerjasama BRPSDI dengan tridarma perguruan tinggi; (2) adanya MoU atau PKS yang jelas, operasional, dan tidak bersifat simbolik; (3) dukungan SDM yang kompeten serta komitmen pimpinan unit dan ketua tim kerja sama; (4) dukungan pendanaan dan fasilitas; (5) money dan koordinasi yang efektif. sejumlah **kegiatan pendukung** yang ikut memperkuat pencapaian kinerja diantaranya program magang mahasiswa dan MBKM, adanya kuliah umum dan bimbingan teknis terkait pengelolaan perikanan dan pemulihan sumber daya ikan, publikasi ilmiah dan pembuatan sejumlah modul pelatihan atau bimbingan teknis



Gambar 9. Screenshot perjanjian kerjasama dengan FPIK-UNTAG Cirebon dan FST-UT

Tabel 26. Capaian IK Kemitraan pada satker setara.

No	Unit Kerja	Target	Capaian	%
1	Balai Riset Pemuliaan Ikan	2	2	100
2	Balai Riset Perikanan Laut	1	1	100
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	1	2	120

Pengarusutamaan gender telah diintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan FST Universitas Terbuka dan FPIK Untag Cirebon, sebagaimana tercermin dari komposisi peserta pada dua kegiatan yang dilaksanakan. Pada kegiatan Kuliah Umum “Blue Economy untuk Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” bekerja sama dengan FPIK UNTAG Cirebon tanggal 24 Februari 2025, dari total 108 peserta tercatat partisipasi peserta pria sebesar 60% (65 orang) dan wanita sebesar 40% (43 orang), menunjukkan keterlibatan gender yang relatif seimbang. Sementara itu, pada kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi lima mahasiswa Program Studi Biologi FST Universitas Terbuka yang berlangsung pada 24 Februari hingga 15 Juni 2025, partisipasi didominasi oleh mahasiswa wanita sebesar 80% (4 orang), sedangkan mahasiswa pria sebesar 20% (1 orang). Data ini menunjukkan adanya ruang partisipasi yang inklusif bagi kedua gender dalam kegiatan kemitraan, dengan kecenderungan meningkatnya keterlibatan perempuan pada program berbasis praktik dan pengembangan kapasitas.

IKK 10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai 'Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) bersifat Triwulanan, dengan tingkat validasi IKU output

kendali tinggi. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Dokumen layanan dukungan menejemen internal satker yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang mendapatkan pengesahan dari Koordinator/Sub Koordinator dan ditandatangani pimpinan satker.

Tabel 27. Capaian IKU 10. BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-10. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)									
Realisasi IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	100	100	100	100	100%	0%	100	100%

Berdasarkan Tabel tersebut, IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%. Nilai capaian tersebut sama dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dimana BRPSDI juga mencapai nilai 100. Nilai Capaian tersebut merupakan representasi dari kegiatan yang sudah terlaksana dan telah menghasilkan output berupa laporan kegiatan.

Capaian IKK 10 terkait Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya pada triwulan IV Tahun 2025 ditunjang oleh **Faktor pendukung** pencapaian indikator ini adalah adanya pelaksanaan dialog kinerja yang berperan penting dalam pemetaan dokumen output serta memastikan ketersediaan dokumen pelaporan pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, **faktor pendukung** pencapaian target IKK adalah adanya kegiatan rapat dan pertemuan yang diadakan dalam pelaksanaan kegiatan turut memperkuat pencapaian indikator ini. Pembaruan data pelaporan melalui aplikasi e-SR Menpan dan Dashboard BPPSDM juga berperan signifikan dalam meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan, sekaligus memperbaiki akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja BRPSDI.

Tabel 28. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Tahun 2025

[illegible]

Tabel 29. Capaian Dukungan Manajemen lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target	Capaian	%
1	Balai Riset Perikanan Laut	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100	100	100
4	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
5	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
6	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100	100	100
7	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	100	100	100
8	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
9	Loka Riset Perikanan Tuna	100	100	100
10	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	100	100	100
11	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	100	100	100

IKK 11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)

Keterbukaan informasi publik didefinisikan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Capaian IKK ini diukur melalui beberapa parameter penilaian diantaranya adalah aspek sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi dan strategi. Metode penilaian dengan menggunakan skala pembobotan untuk menentukan atau menetapkan kategori yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Tabel 30. Capaian IKK 11 BRPSDI Triwulan IV Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW IV 2021-2024				TW IV 2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	90	100	111,11	-	90	111,11

Hasil pengukuran capaian kegiatan Keterbukaan Informasi Publik ini terbagi dalam lima katagori nilai yaitu informatif (90-100), Menuju informatif (80-89,9), Cukup Informatif dengan (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (≤ 39).

Capaian IKK 11 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang “Hasil penilaian evaluasi mandiri monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025”.

Pada triwulan IV tahun 2025 ini, BRPSDI berhasil memperoleh capaian 100 dari target 90 yang ditentukan. Pada lingkup KKP BRPSDI menjadi salah satu dari 41 UPT yang berhasil memperoleh nilai maksimal (100). Namun demikian, nilai ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKK ini adalah IKK baru yang dicascadingkan tahun 2025.

Tabel 31. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai) tahun 2025 pada lingkup KKP

No	Unit Kerja	Capaian
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
4	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam	99,90
5	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura	98,85
6	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta	98,50
7	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima	97,80

Faktor keberhasilan dalam capaian nilai keterbukaan informasi publik adalah komitmen pimpinan dan SDM yang berkompeten. Komitmen pimpinan dan kualitas SDM merupakan dua pilar utama karena keterbukaan informasi memerlukan dukungan kebijakan (top-down) sekaligus eksekusi teknis yang kompeten terutama SDM untuk pengelolaan website dan pelayanan. Komitmen pimpinan menjamin ketersediaan anggaran, payung hukum, dan sarana prasarana yang memadai, sementara SDM yang kompeten memastikan data dikelola secara akurat, diperbarui tepat waktu, dan dilayani sesuai standar UU KIP. **Kegiatan pendukung** yang ikut memperkuat pencapaian nilai keterbukaan informasi publik. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan monitoring KIP secara rutin menjadi faktor pendukung yang krusial karena berfungsi menjaga konsistensi dan kualitas layanan informasi secara berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas, petugas PPID tetap relevan dengan regulasi terbaru dan kemajuan teknologi digital, sementara monitoring rutin memungkinkan deteksi dini terhadap kendala teknis atau administratif sebelum penilaian resmi dimulai.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 6720-3055-4685-5943) yang setelah disahkan pada tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.361.977.000,-. BRPSDI telah melakukan 3 (Tiga) kali revisi DIPA pada DIPA TA 2025. Berikut merupakan kronologis revisi DIPA yang telah dilakukan BRPSDI pada Tahun 2025, yaitu:

Revisi VI (Triwulan IV), berkaitan dengan pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama dalam KRO yang sama dan perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pertimbangan untuk mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Pada revisi ini dilakukan penambahan untuk Belanja Pegawai (01) guna keperluan pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi VI Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2025 (DS: 6440-4150-0409-0500) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan jumlah anggaran BRPSDI adalah Rp. 5.420.575.000,-.

Revisi VII (Triwulan IV), berkaitan dengan optimalisasi penyerapan dan capaian realisasi anggaran TA 2025 lingkup BPPSDM. Sehubungan dengan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.1213/MENKP/XI/2025 tanggal 11 November 2025 dan surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP No. B.2281/BPPSDM/RC.420/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 2025 hal Usulan Revisi Belanja Gaji Pegawai BPPSDM KP, maka revisi dilakukan dengan pengurangan anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai (001) BRPSDI sebesar Rp 260.000.000,- dengan rincian realokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk Belanja Operasional Kantor (002) atas kebijakan dari Sekretariat BPPSDM dan sisa anggaran sebesar sebesar Rp 160.000.000,- dialokasikan kepada Sekretariat BPPSDM untuk menutupi kekurangan belanja gaji dan tunjangan UPT lingkup BPPSDM. DIPA terbaru setelah revisi VII sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi VII Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2025 (DS: 9016-4286-7190-7481) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan pada

tanggal 19 November 2025 dengan jumlah anggaran BRPSDI menjadi Rp. 5.260.575.000,-.

Revisi VIII (Triwulan IV), berkaitan dengan pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama dalam KRO yang sama dan perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pertimbangan untuk mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Pada revisi ini dilakukan pergeseran anggaran Belanja Keperluan Kantor dengan kode akun 521111 terkait Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pembayaran BPJS PPNPN dialihkan untuk Belanja Barang Operasional Lainnya (521119), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121), dan Belanja Langganan Listrik (522111). Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi VIII Petikan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2025 (DS: 9016-4286-7190-7481 tidak berubah) yang telah disahkan pada tanggal 24 November 2025 dengan jumlah anggaran BRPSDI menjadi Rp. 5.260.575.000,-.

Jumlah realisasi keuangan BRPSDI berdasarkan aplikasi OMSPAN/SAKTI per tanggal 31 Desember 2025 ialah **99,37 %** atau **Rp. 5.227.242.323,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 2.649.573.652,-** atau **98,98 %** dan belanja barang (52) **Rp. 2.577.668.671,-** atau **99,77 %**.

Tabel 32. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Thd Pagu Awal	% Thd Pagu Efektif
1.	Belanja Pegawai	2.936.977.000	260.000.000	2.676.977.000	2.649.573.652	90,21%	98,98%
2.	Belanja Barang	3.368.004.000	784.406.000	2.583.598.000	2.577.668.671	76,53%	99,77%
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran :		6.304.981.000		5.260.575.000	5.227.242.323	82,91%	99,37%

Tabel 30. Realisasi Anggaran BRPSDI per IKK Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00%	Layanan Manajemen Keuangan: Pelayanan Keuangan Riset Perikanan	5.197.055.000	5.164.584.865	99,38%
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai)	92	98,13	106,66%	Layanan Perkantoran: Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80	83,50	104,38%	Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	3.760.000	3.590.000	95,48%
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5	100	120,00%	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Riset Perikanan	3.230.000	3.215.000	99,54%

		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5	93,91	113,83%	Layanan Manajemen SDM: Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan	2.930.000	2.767.300	94,45%
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00%	Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Riset Perikanan	41.820.000	41.449.664	99,11%
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80	100	120,00%	Layanan BMN: Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Perikanan	2.530.000	2.530.000	100,00%
		8	Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.000	30.589.632	120,00%	Layanan data dan Informasi: Pelayanan Data dan Informasi Riset Perikanan	2.930.000	2.875.000	98,12%
		9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1	2	120,00%	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi: Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Riset Perikanan	6.320.000	6.230.494	98,58%
		10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00%				



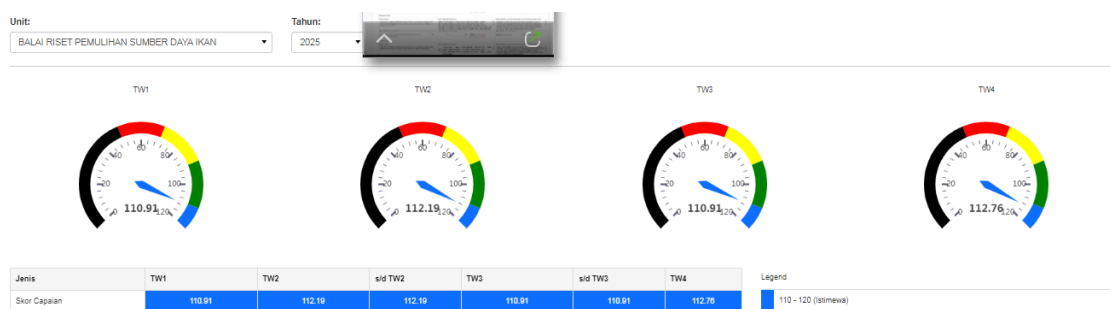
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN (BRPSDI)
Research Institute For Fish Resources Enhancement (Rifre)

		11	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90	100	111,11%				
TOTAL						112,76		5.260.575.000	5.227.242.323	99,37%

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tugas dan fungsi BRPSDI dalam mendukung BPPSDMKP dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Beberapa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi eksternal (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) atau Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>). Berdasarkan hasil pengukuran Kinerjaku, capaian kinerja BRPSDI menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **112,76%** dengan status Istimewa (warna biru). Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 99,37% dari pagu anggaran efektif total Rp. 5.260.575.000 dari pagu semula Rp. 6.361.977.000,-. Dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.



Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 11 IKK yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode tahun 2025 yakni 11 (sebelas) IKK. Hasil validasi yang telah dilakukan, keenam IKK tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Data dukung capaian BRPSDI yang memuat capaian 11 IKK telah diunggah melalui tautan : https://bit.ly/BRPSDI_Capaian2025. Adapun IKK tersebut, antara lain:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 85, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85 (100,00%);
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 92, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 98,13 (106,66,00%);

3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 83,50 (104,38%);
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 71,5, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target tahunan yakni 82,5, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 93,91 (113,83%);
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
8. Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target tahunan yakni Rp. 2.200.000, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 33.815.448 (120,00%);
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan), memiliki target tahunan yakni 1, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 2 (120,00%);
10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100,00%);
11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan yakni 90, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (111,11%).

4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis. Secara umum kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Berikut merupakan permasalahan yang muncul selama periode Tahun 2025:

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
Adanya kebijakan penganggaran terkait dengan rekomposisi belanja pegawai lingkup BPPSDM	Melakukan revisi anggaran terkait dengan belanja gaji dan operasional	Optimalisasi dan Akselerasi untuk penyerapan belanja barang operasional lainnya	Prosentase realisasi belanja pegawai 98,98% dan operasional 99,80% dengan total realisasi anggaran 99,37%

4.3 Saran

BRPSDI pada periode tahun 2025 berhasil memperoleh capaian kinerja pada katagori Istimewa, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun demikian, dalam rangka melakukan perbaikan kedepan beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain adalah melakukan verifikasi, validasi, dan pemantauan berkala terkait ketercapaian setiap indikator kinerja, serta melakukan koordinasi yang intensif dengan bagian terkait pada tingkat sekretariat BPPSDM dalam penyelesaian permasalahan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Tugas Pengelola Kinerja BRPSDI 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 750902, POS ELEKTRONIK: brpsdi@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

DIPERINTAHKAN:

- Kepada : NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

- Untuk :
1. Di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2025;
 2. Masa Kerja Tim Pengelolaan Kinerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terhitung sejak Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
 3. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Purwakarta, 7 Januari 2025
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran I

Nomor : B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum
3.	Anggota	Riswanto, S.Kel., M.Si Indriatmoko, S.Kel., M.Si Dimas Angga Hediarto, S.Pi., M.Si Rakhmat Sarbini
4.	Kontributor	Tatok Priswanto, S.E Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si Ahmad Fahrudin, S.A.N

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II

Nomor : B.16/BRPSDI/KP.440/II/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

URAIAN TUGAS
SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2025

1. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
 - b. Ketua
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) Tahun 2025 sesuai dengan arahan dan kebijakan penanggung jawab Tim Penyusunan laporan kinerja (LKj)
 - c. Anggota
 - 1) Menyiapkan bahan dan informasi serta bukti capaian kinerja serta menyusun laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
 - 2) Melakukan pemutakhiran data dan informasi serta rekonsiliasi pada system aplikasi pengelolaan kinerja
 - d. Kontributor
Membantu pengumpulan bahan, menyiapkan dan menyampaikan data informasi serta bukti capaian kinerja dalam penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 mengikuti jadwal dan arahan dari Sekretariat BPPSDM KP sebagai intansi Pembina dalam penyusunan Laporan Kinerja

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II. Dokumen PK BRPSDI Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iswari Ratna Astuti**

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80
		8.	Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.000
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100
		11.	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.260.575.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025		5.260.575.000

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran III. Dokumen capaian realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

Nomor : B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 09 Januari 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025

Yth. (daftar nama terlampir)

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2025 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup BPPSDM pada periode Tahun 2025 sebesar 91,88% (tuntas 328 dari 357 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen disampaikan pada lampiran;
4. UPT yang tidak terdapat pada lampiran, merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan I, sehingga capaian IKU-nya 100%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat menjadi dasar pencapaian hasil pengawasan tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPSDM
Plt. Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

Tembusan :
1. Kepala Badan
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat

Nomor : B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM
Triwulan IV Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	80	57	71,25
2	Pusat Pendidikan KP	26	24	92,31
3	Pusat Pelatihan	4	4	100,00
4	Pusat Penyuluhan (Pusriskel)	25	25	100
5	BBRP2BKP	0	0	0
6	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BDA SUKAMANDI	4	4	100,00
2	BPPP TEGAL	17	17	100,00
3	SUPM LADONG	2	2	100,00
4	SUPM KOTA AGUNG	2	2	100,00
5	SUPM TEGAL	49	49	100,00
6	SUPM WAIHERU	2	2	100,00
7	POLTEK AUP JAKARTA	56	52	92,86
8	POLTEK SORONG	1	1	100,00
9	POLTEK BITUNG	1	1	100,00
10	POLTEK BONE	23	23	100,00
11	POLTEK SIDOARJO	4	4	100,00
12	POLTEK KARAWANG	25	25	100,00
13	POLTEK KUPANG	1	1	100,00
14	POLTEK JEMBRANA	1	1	100,00
15	POLTEK DUMAI	1	1	100,00
16	POLTEK PANGANDARAN	13	13	100,00
17	AKADEMI KOMODITAS WAKATOB	1	1	100,00
18	BRPPUPP PALEMBANG	11	11	100,00
19	BRPBAPP MAROS	5	5	100,00
20	BRPBATP BOGOR	3	3	100,00

a.n Kepala BPPSDM

Pt. Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran IV. Dokumen Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

30	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	92.85	99.20	100.00	100.00	95.64	100.00	98.33	100%	0.00	98.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	19.84	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	96.43			98.71			100.00				
31	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.54	100.00	93.33	100.00	99.38	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	20.00	9.33	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.27			98.18			100.00				
32	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSP) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42			98.03			100.00				
33	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43			99.76			100.00				
34	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30			99.76			100.00				
35	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	89.74	100.00	100.00	100.00	96.63	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	94.87			99.16			100.00				

hal : 6 dari 30 halaman

tanggal cetak : 10-01-20 04:40:01 oleh : KL032

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran V. Dokumen Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

Nomor : B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 7 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 lingkup BPPSDM

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Verifikasi Bukti Dukung SAKIP level 3 UPT lingkup BPPSDM Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 19 Juni 2025, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP level 3 hasil Penilaian Mandiri tahun 2025

No.	Satker	Target IKU	Hasil Penilaian Mandiri		Keterangan
			Nilai	Predikat	
1.	BPPP Medan	80,00	85,00	A	Target IKU Tercapai
2.	Politeknik KP Jembrana	81,00	84,70	A	Target IKU Tercapai
3.	BRPPUPP Palembang	80,00	84,40	A	Target IKU Tercapai
4.	BRBIH Depok	81,05	84,25	A	Target IKU Tercapai
5.	Politeknik AUP	81,00	83,95	A	Target IKU Tercapai
6.	Politeknik KP Sidoarjo	81,00	83,60	A	Target IKU Tercapai
7.	BPPP Ambon	80,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
8.	BPPP Tegal	80,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
9.	BRPBAPPP Maros	81,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
10.	BRPI Sukamandi	81,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
11.	BRPSDI Jatiluhur	80,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
12.	LRBRL Gorontalo	80,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
13.	LRMPHP Bantul	80,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
14.	LRPT Bena	80,05	83,50	A	Target IKU Tercapai
15.	LRSDKP Bungus	81,00	83,50	A	Target IKU Tercapai
16.	BPPP Banyuwangi	80,00	83,15	A	Target IKU Tercapai
17.	BPPP Bitung	80,00	83,15	A	Target IKU Tercapai
18.	BRPL Ancol	80,00	83,15	A	Target IKU Tercapai
19.	BBRBLPP Gondol	81,00	83,05	A	Target IKU Tercapai
20.	BRPBATPP Bogor	81,00	82,90	A	Target IKU Tercapai
21.	Politeknik KP Pangandaran	81,00	82,75	A	Target IKU Tercapai
22.	BDA Sukamandi	80,00	82,65	A	Target IKU Tercapai
23.	AK Wakatobi	81,00	82,30	A	Target IKU Tercapai
24.	Politeknik KP Sorong	81,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
25.	Politeknik KP Karawang	81,00	82,20	A	Target IKU Tercapai
26.	Politeknik KP Dumai	81,00	82,15	A	Target IKU Tercapai
27.	Politeknik KP Bitung	81,00	81,85	A	Target IKU Tercapai
28.	Politeknik KP Kupang	81,00	81,85	A	Target IKU Tercapai
29.	SUPM Waeheru	81,00	81,80	A	Target IKU Tercapai
30.	Politeknik KP Bone	81,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
31.	SUPM Ladang	81,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
32.	SUPM Pariaman	81,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
33.	SUPM Pontianak	80,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
34.	SUPM Tegal	81,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
35.	LPTK Wakatobi	80,00	81,20	A	Target IKU Tercapai
36.	SUPM Kota Agung	81,00	81,05	A	Target IKU Tercapai
37.	SUPM Sorong	80,00	80,85	A	Target IKU Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sida dan Sani Negara

2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana pada berita acara yang dapat diunduh pada link <https://bit.ly/BAPMSAKIPBPPSDM2025>, maka direkomendasikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :
- a. Menjadikan budaya kinerja yang baik dan diimplementasikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala
 - b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada berita acara penilaian mandiri SAKIP tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

a.n Kepala BPPSDM,
Sekretaris BPPSDM



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan :

1. Kepala BPPSDM
2. Kepala Pusat Penyuluhan KP
3. Kepala Pusat Pelatihan KP
4. Kepala Pusat Pendidikan KP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran VI. Dokumen Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Plt. Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Lampiran : Satu berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MONEV

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role: PIRH TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan: 42 entri

Carli:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Effisiensi Penggunaan SBK	Effisiensi SBK
1	003.12.020701	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00
2	003.12.120010	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
3	003.12.120701	BALAI PELATIHAN DAN PEMULIHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	003.12.120701	BALAI PELATIHAN DAN PEMULIHAN PERIKANAN ANSON	100,00	100,00	100,00	100,00
5	003.12.120701	BALAI PELATIHAN DAN PEMULIHAN PERIKANAN BONTOLWANGU	100,00	100,00	100,00	100,00
6	003.12.120701	BALAI PELATIHAN DAN PEMULIHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
7	003.12.120701	BALAI PELATIHAN DAN PEMULIHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
8	003.12.120701	AKADEMI KONGRES KELAUTAN DAN PERIKANAN NAGATOSI (AK KP NAGATOSI)	84,42	99,22	100,00	0,00
9	003.12.400001	LONA RISET SUMBER DAYA DAN KEMENTERIAN PERUSAHA	100,00	100,00	100,00	100,00
10	003.12.400001	LONA PERKAYANGAN TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00
11	003.12.400001	PUSAT PEMULIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	003.12.400001	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
13	003.12.400001	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN DUMU DAN PEMULIHAN PERAIRAN	100,00	100,00	100,00	100,00
14	003.12.400001	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
15	003.12.400001	LONA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	003.12.400001	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PEMULIHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
17	003.12.400001	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PEMULIHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
18	003.12.400001	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PEMULIHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	003.12.400001	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00
20	003.12.400001	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	003.12.400001	LONA RISET BUDIDAYA BUNYUT LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
22	003.12.400001	LONA RISET MENANGKAP PEMULIHAN IKAN PERAIRAN	100,00	100,00	100,00	100,00
23	003.12.400001	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BUDIDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
24	003.12.400001	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
25	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUBARANG	92,50	100,00	100,00	50,00
26	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUBARANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00
28	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMU (POLTER KP DUMU)	90,00	100,00	100,00	33,35
29	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTER KP PANGANDARAN)	75,00	100,00	0,00	0,00
30	003.12.400001	POLITERAK ANU USAHA PERIKANAN (POLTER ANU JABART)	92,50	100,00	100,00	50,00
31	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LAGUNA	100,00	100,00	100,00	100,00
32	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PADJARAN	100,00	100,00	100,00	100,00
33	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00
34	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONDOWASE	92,50	100,00	100,00	50,00
35	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONDOWASE	100,00	100,00	100,00	100,00
36	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBERANG (POLTER KP JEMBERANG)	100,00	100,00	100,00	100,00
37	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN SODALJO	100,00	100,00	100,00	100,00
38	003.12.400001	LEKSTASAT BADAN PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50
39	003.12.400001	POLITERAK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONDOWASE	75,00	100,00	0,00	0,00
40	003.12.400001	BEROLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA MEUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
41	003.12.400001	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APATURU SURABAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
42	003.12.400001	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 42 dari 42 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DPA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-13 11:48:21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran VII. Dokumen Capaian Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026

Yth : Para Kepala Unit Organisasi lingkup BPPSDM
Dari : Plt. Sekretaris BPPSDM
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran IPASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM
Tanggal : 6 Januari 2026

Memperhatikan telah ditutupnya penarikan data IPASN lingkup KKP pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 23.59 untuk pengukuran hasil capaian IPASN Tahun 2025, berikut disampaikan capaian IPASN unit organisasi lingkup BPPSDM sebagai terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya nilai capaian IPASN dimaksud dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

Tembusan:
Kepala BPPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Nota Dinas
Nomor 62/BPPSDM/KP.720/I/2026
Tanggal 6 Januari 2026

DAFTAR CAPAIAN IPASN TAHUN 2025 LINGKUP BPPSDM

No	Unit Kerja	Target IP ASN	Nilai IP ASN	Persentase Capaian (Nilai/Target) x 100%
1	BPPSDM (untuk Sekretariat BPPSDM)	81	85.61	105.69%
2	Pusat Penyuluhan KP	82	87.03	106.13%
3	Pusat Pendidikan KP	87	88.96	102.25%
4	Pusat Pelatihan KP	83	89.73	108.11%
5	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP	80	90	112.50%
6	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	76	93.8	123.42%
7	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP	85	88.49	104.11%
8	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83.39	102.95%
9	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	81	83.35	102.90%
10	Balai Riset Perikanan Laut	83	88.5	106.63%
11	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	82.5	93.91	113.83%
12	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	84.29	104.06%
13	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	84.99	104.93%
14	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	82	88.89	108.40%
15	Balai Riset Pemuliaan Ikan	83	87.4	105.30%
16	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	84	86.46	102.93%
17	Politeknik KP Sidoarjo	84	87.76	104.48%
18	Politeknik KP Bitung	84	85.34	101.60%
19	Politeknik KP Sorong	84	84.34	100.40%
20	Politeknik KP Karawang	84	89.7	106.79%
21	Politeknik KP Kupang	84	85.51	101.80%
22	Politeknik KP Bone	84	88.47	105.32%
23	Politeknik KP Dumai	84	94.08	112.00%
24	Politeknik KP Pangandaran	84	87.2	103.81%
25	Politeknik KP Jembrana	84	89.71	106.80%
26	Akademi Komunitas KP Wakatobi	84	93.24	111.00%
27	SUPM Ladang	84	87.16	103.76%
28	SUPM Pariaman	84	89.03	105.99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran VIII. Dokumen capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Sektor	Paket RUP Tanamunikan			Statistik Monor				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PERYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DA)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Salah Pagu Tanamunikan Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000	-	-	1,269,824,000	1,845,939,000	0 100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BERBILUP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-	-	-	2,534,284,000	2,534,284,000	0 100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000	-	-	-	6,063,515,000	6,063,515,000	0 100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BRPSDKP	114,882,000	-	114,882,000	-	-	-	114,882,000	114,882,000	0 100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MABOS	630,835,000	1,482,437,000	2,113,272,000	47,380,000	-	-	2,075,892,000	2,113,272,000	0 100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,847,000	9,431,710,000	5,753,200,000	-	-	3,678,510,000	9,431,710,000	0 100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000	-	-	2,023,875,000	2,313,249,000	0 100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000	-	-	1,848,394,000	2,124,597,000	0 100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	16,799,969,000	-	16,799,969,000	16,639,336,000	-	-	3,169,373,000	16,799,969,000	0 100.00%
10	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000	-	-	-	1,453,775,000	1,453,775,000	0 100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HAS BIRIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000	-	-	-	2,579,025,000	2,579,025,000	0 100.00%
12	BALAI RISET PENYULUHAN IKAN BIRIH	3,697,213,000	-	3,697,213,000	-	-	-	3,697,213,000	3,697,213,000	0 100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000	-	-	-	2,085,628,000	2,085,628,000	0 100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,203,000	197,855,000	7,954,058,000	1,611,115,000	-	-	6,342,943,000	7,954,058,000	0 100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,936,402,000	-	4,936,402,000	-	-	-	4,936,402,000	4,936,402,000	0 100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000	-	-	-	904,514,000	904,514,000	0 100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMBU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,337,000	6,214,629,000	-	-	-	6,214,629,000	6,214,629,000	0 100.00%
18	LOKA PERIKAYASAAH TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,043,000	1,237,094,000	1,456,137,000	-	-	-	1,456,137,000	1,456,137,000	0 100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRSBL	1,223,254,000	74,006,000	1,297,260,000	-	-	-	1,297,260,000	1,297,260,000	0 100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000	-	-	-	925,636,000	925,636,000	0 100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LSPF	1,941,833,000	-	1,941,833,000	-	-	-	1,941,833,000	1,941,833,000	0 100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSQKP	1,036,654,000	1,053,548,000	2,090,202,000	-	-	-	2,090,202,000	2,090,202,000	0 100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000	-	-	9,793,423,000	15,571,107,000	0 100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,230,863,000	-	2,230,863,000	1,086,667,000	-	-	1,122,872,000	2,230,863,000	0 100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000	-	-	3,285,152,000	4,736,172,000	0 100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,986,000	-	-	1,612,140,000	4,929,136,000	0 100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUBERANA	711,207,000	1,933,054,000	2,644,261,000	1,156,133,000	-	-	1,478,128,000	2,644,261,000	0 100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044	-	-	2,534,356,600	27,426,832,644	0 100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,344,000	2,863,349,000	530,879,000	-	-	2,332,470,000	2,863,349,000	0 100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKADJARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,888,000	-	-	1,217,558,000	1,438,446,000	0 100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SODARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,002,000	-	-	3,331,310,000	9,709,402,000	0 100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,862,000	-	-	1,935,671,000	8,176,523,000	0 100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000	-	-	7,484,452,000	7,486,312,000	0 100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000	-	-	1,067,307,000	1,296,505,000	0 100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,995,000	1,088,140,000	1,999,095,000	756,610,000	-	-	1,243,485,000	1,999,095,000	0 100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARAMAN	2,986,553,000	16,862,000	3,003,415,000	902,105,000	-	-	2,104,350,000	3,003,415,000	0 100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000	-	-	-	851,173,000	851,173,000	0 100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000	-	-	-	1,049,687,000	1,049,687,000	0 100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000	-	-	1,144,245,000	1,580,550,000	0 100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	907,390,000	-	-	1,456,527,000	1,963,917,000	0 100.00%
41	SEKRETARAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000	-	-	15,167,048,464	25,694,351,464	0 100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000	-	-	133,040,000	183,690,000	0 100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,888,000	208,693,652,108	89,646,740,044	-	-	119,046,912,064	208,693,652,108	- 100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :
• (Pagu Tanamunikan / Pagu Pengadaan) x 100%
• (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan undi hasil melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Nilai Capaian
100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran IX. Dokumen Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025

Yth : 1. Para Kepala Pusat
2. Para Kepala Balai Besar
3. Para Direktur
4. Para Kepala Balai
5. Para Kepala Loka
Dari : Plt. Sekretaris BPPSDM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Capain IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025"
Tanggal : 15 Desember 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025", dengan rincian sebagai berikut:

1. Capain IKU diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Barang Milik Negara Eselon 1 BPPSDM pada masing-masing unit kerja di lingkup BPPSDMKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain;
 - a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - 1) Laporan RKBMN Tahun 2025 dan revisi (jika terdapat revisi);
 - 2) RKAKL Tahun 2025 revisi terakhir;
 - b. Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN TA. 2025 sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
 - c. Dokumen usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN TA. 2025 untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
 - d. Penggunaan BMN Hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima atau surat keputusan penggunaan BMN (BAST/Berita Acara Pemakaian);
 - e. Laporan BMN Tahunan 2024 dan Semester 1 TA. 2025 beserta surat penyampaian kepada eselon 1;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 4214/BPPSDM.1/PL.760/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

NO	NAMA SATKER	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1	Balai Riset Pemuliaan Ikan	80	100
2	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone	80	100
3	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan	80	100
4	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang	80	100
5	Sekretariat BPPSDM KP	80	100
6	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	80	100
7	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waiheru Ambon	80	100
8	Loka Perkayasaan Teknologi Kelautan	80	100
9	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	80	100
10	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	80	97,5
11	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	80	97,5
12	Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	80	97,5
13	Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5
14	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5
15	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung	80	97,5
16	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	80	97,5
17	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai	80	97,5
18	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	80	97,5
19	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	80	97,5
20	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	80	97,5
21	Akademi Komunitas Kelautan Dan Perikanan Wakatobi	80	97,5
22	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	80	97,5
23	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	80	95
24	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	80	95
25	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong	80	95
26	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran	80	95
27	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Bitung	80	95
28	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	80	95
29	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	80	95
30	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan	80	95
31	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan	80	90
32	Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir	80	90
33	Pusat Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan	80	85
34	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana	80	85
35	Loka Riset Perikanan Tuna	80	85
36	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	80	82,5
37	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon	80	80,0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran X. Dokumen capaian Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 178/BPPSDM.1/ KU.340/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Pusat Lingkup BPPSDMKP
2. Para Kepala UPT Lingkup BPPSDMKP
Dari : Plt. Sekretaris BPPSDMKP
Hal : Capaian Kinerja PNBP Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2025
Lampiran: : Satu lembar
Tanggal : 12 Januari 2026

Bersama ini terlampir kami sampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025. Data capaian sebagaimana dimaksud berdasarkan data pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bukti capaian kinerja PNBP Satuan Kerja Lingkup BPPSDM Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

Tembusan:
Kepala BPPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 178/BPPSDM.1/KU.340/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**CAPAIAN KINERJA PNBP SATKER BPPSDM
TAHUN ANGGARAN 2025**

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER LINGKUP BPPSDMKP TAHUN 2025				
NO	Kode Nama Satker	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.853.240.000	50.136.939.163	129,04%
	SATKER PNBP	14.250.179.000	11.126.256.821	78,08%
1	03212-237373 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	780.431.842	274,6%
2	03212-238010 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	411.665.000	472.324.776	114,7%
3	03212-238741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	55.052.000	57.172.492	103,9%
4	03212-238755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	735.185.000	778.364.570	105,9%
5	03212-238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	319.141.000	402.849.385	126,2%
6	03212-239260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	233.678.011	123,9%
7	03212-352595 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	17.177.000	23.161.771	134,8%
8	03212-403817 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	28.393.000	28.393.736	100,0%
9	03212-403820 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	13.459.398	-
10	03212-403821 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	159.143.859	289,2%
11	03212-403822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	58.519.975	-
12	03212-403823 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	39.982.000	41.312.999	103,3%
13	03212-403824 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	33.815.448	1537,1%
14	03212-403826 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	-	7.160.000	-
15	03212-403827 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	241.328.000	251.780.664	104,3%
16	03212-403828 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	941.493.000	1.028.132.377	109,2%
17	03212-403829 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	92.800.000	176.484.476	190,2%
18	03212-403830 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	181.774.000	195.154.380	107,4%
19	03212-403832 BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	408.640.000	460.318.570	112,6%
20	03212-403833 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	26.500.000	119.795.732	452,1%
21	03212-403834 LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	-	3.416.975	-
22	03212-403835 BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	13.559.200	-
23	03212-403836 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	54.985.506	-
24	03212-403837 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	111.885.000	595.849.370	532,6%
25	03212-403838 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	160.329.000	165.460.205	103,2%
26	03212-403839 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	385.000.000	554.815.173	144,1%
27	03212-403875 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	95.797.000	99.591.100	104,0%
28	03212-403879 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	20.915.000	85.049.871	406,6%
29	03212-427511 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	1.914.969.000	2.016.706.137	105,3%
30	03212-427551 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	36.805.000	43.036.914	116,9%
31	03212-427573 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	504.543.000	523.839.215	103,8%
32	03212-427582 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	-	120.305.178	-
33	03212-427618 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	344.304.000	365.863.510	106,3%
34	03212-427630 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	-	277.368.537	-
35	03212-440013 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	454.385.000	498.295.335	109,7%
36	03212-626402 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	176.748.750	-
37	03212-634146 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	140.035.000	148.091.532	105,8%
38	03212-652009 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	15.610.000	20.708.072	132,7%
39	03212-653526 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	32.775.000	41.111.780	125,4%
	SATKER BLU	24.603.061.000	39.010.682.342	158,6%
40	03212-239188 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	14.262.371.000	25.847.561.796	181,2%
41	03212-622035 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	10.340.690.000	13.163.120.546	127,3%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran XI. Dokumen Capaian Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B/98/UN31.FST/HK.08.00/2025
NOMOR : 9/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jatiluhur, Purwakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST UT), yang berkedudukan di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Paraf	
FST UT	
BRPSDI	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON

NOMOR : 37/BRSDM/KKP/PKS/IX/2023
NOMOR : 070/Dek-FPIK/UNTAG/IX/2023

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA

Pada hari ini Jumat, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (15-September-2023), bertempat di Purwakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **Iswari Ratna Astuti**
Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Cilalawi No.1, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat

Paraf	
BRPSDI	
UNTAG	

Lampiran XII. Dokumen capaian Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

NO	LAPORAN	B01		B02		B03		S.D TW I		B04		B05		B06		S.D TW II		B07		B08		B09		S.D TW III		B10		B11		B12		S.D TW IV		PRESENTASE	DATA DUKUNG
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN				
1	Laporan Mingguan	4	4	4	4	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	24	24	4	4	4	4	4	4	36	36	4	4	4	4	4	4	48	48	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JMAydeq4K5x0q4hZCw-UndR0Av_IrnW7usg-drive_link
2	Laporan Bulanan	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	2	2	2	2	12	12	2	2	2	2	2	2	18	18	2	2	2	2	2	2	24	24	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UW5CQZQvO-nickw4jmgG6d9Zm0rF7usg-drive_link
a	Laporan Bulanan (Manajerial)	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	6	6	1	1	1	1	1	1	9	9	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1H_oD-X5d4g_15qoh6gm0LzngTmQ-anb7usg-drive_link
b	Laporan Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	6	6	1	1	1	1	1	1	9	9	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1UGxkOHEp7n6c8nM56ebzXlckUULvs7usg-drive_link
3	Laporan Triwulanan	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	6	6	0	0	0	0	3	3	9	9	0	0	0	0	3	3	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1i5i7xSeVQV8xWVzggd9mweSe7usg-drive_link
a	Laporan Kinerja Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1tduJukx3D0HfVjap874FJENZa7usg-drive_link
b	Laporan SPIP Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1TrBNWjpbh-2k18LdxGk-bb1_Rwz2Q7usg-drive_link
c	Laporan Kegiatan JF	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1TrbQZGd01uhZupDh5QLibV73xv9QV7usg-drive_link
4	Laporan Semesteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	4	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Ys3cq2hwJ_77d0UuH2392H0XADSHh7usg-drive_link
a	Laporan Layanan BMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gK0Kf5_18xtwrt67PpDYGQoCQAI7usg-drive_link
b	Laporan Layanan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1uGnmvUoaZnQGrL8gETYYn01hM6n2_7usg-drive_link
4	Laporan Tahunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12uB13PwMYfR6CjUyD76T-Sva3R0u7usg-drive_link	
a	Laporan Layanan Humas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gab_000S1HCwqFhhMMKvHyUjpnk5Ta7usg-drive_link	
b	Laporan LayananPengaduan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DwVwQJhUuQDcP0R9D3kUJPO_V-H7usg-drive_link	
c	Laporan Layanan Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ma4Wpa7vN6k72QpD0BqM7yag0rtu7usg-drive_link	
d	Laporan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1MMDHqPn8SPvVUH-RcdNoyGpL7uac7usg-drive_link	
e	Laporan Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1P3APw0bUwLJ_ujQ3A3UyG1xWYU7w67usg-drive_link	
f	Laporan Layanan Penyelenggaraan SakIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qgBNErH2k0bN8CQvSe4v9v7VST7usg-drive_link	
g	Laporan Layanan Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1SCYdyqW25y_1dmpL3wJL5QZRM3h7usg-drive_link	
TOTAL LAPORAN LAYANAN DUKUN																																		100%	

Lampiran XIII. Dokumen Capaian Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	100
12.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	100
13.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	100
14.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	100
15.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	100
16.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	100
17.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	100
18.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	100
19.	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	100
20.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	100
21.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Ambon	100
22.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa	100
23.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual	100
24.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	100
25.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
26.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
27.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
28.	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	100
29.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	100
30.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	100
31.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram	100
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Sorong	100
33.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon	100
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh	100
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II	100
36.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan	100
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate	100
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	100
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon	100
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung	100
41.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara